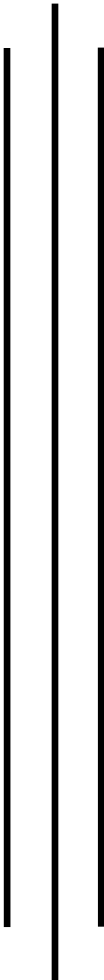


LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2027





RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM
TAHUN 2027



AMSAKAR ACHMAD
WALI KOTA BATAM

LI CLAUDIA CHANDRA
WAKIL WALI KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Satpol PP) Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Satpol PP) ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Satpol PP) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Ketenteraman Ketertiban Umum, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Satpol PP) Tahun 2027

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Satpol PP) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, 21 Juli 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam



Imam Tohari,.S.H.M.H

Nip. 19730510 200701 1 033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025	7
2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025.....	10
2.3. Rumusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027. 18	
2.3.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	18
2.3.2. Permasalahan.....	36
2.3.3. Kondisi Lingkungan Dinamis.....	37
2.4. Telaahan Pokok-pokok pikiran DPRD	38
2.5. Inovasi bidang urusan dalam Upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat.....	39
BAB III	42
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	42
3.2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah	44
BAB IV	47
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027	48
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk pencapaian Program Prioritas Daerah, Kontribusi terhadap pencapaian Target	

Nasional, Pencapaian SPM, dan Tematik lainnya sesuai bidang urusan	70
BAB V	78
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	78
5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	79
BAB VI	82
PENUTUP	82
6.1. Catatan Penting.....	82
6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	82
6.3. Rencana Tindak Lanjut.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU.....	8
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK.....	9
Tabel 2.3.	Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025.....	11
Tabel 2.4.	Rincian Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023.....	12
Tabel 2.5.	Rincian Evaluasi Capaian SPM Tahun 2024.....	14
Tabel 2.6.	Rincian Evaluasi Capaian SPM Tahun 2025.....	17
Tabel 2.7.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.....	22
Tabel 2.8.	Pokok-pokok pikiran DPRD.....	39
Tabel 2.9.	Inovasi Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum.....	41
Tabel 3.1.	Target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2027.....	43
Tabel 3.2.	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027.....	45
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027.....	48
Tabel 4.2.	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027 terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	71
Tabel 4.3.	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027 terhadap Program Strategis Nasional (ProSN).....	75
Tabel 4.4.	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional	76
Tabel 4.5.	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027 terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.....	77
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Utama.....	79
Tabel 5.2	Target indikator Kinerja Kunci	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RKPD.....2

Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan Renja2

Gambar 1.3. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya.....3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satpol PP Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satpol PP Kota Batam Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

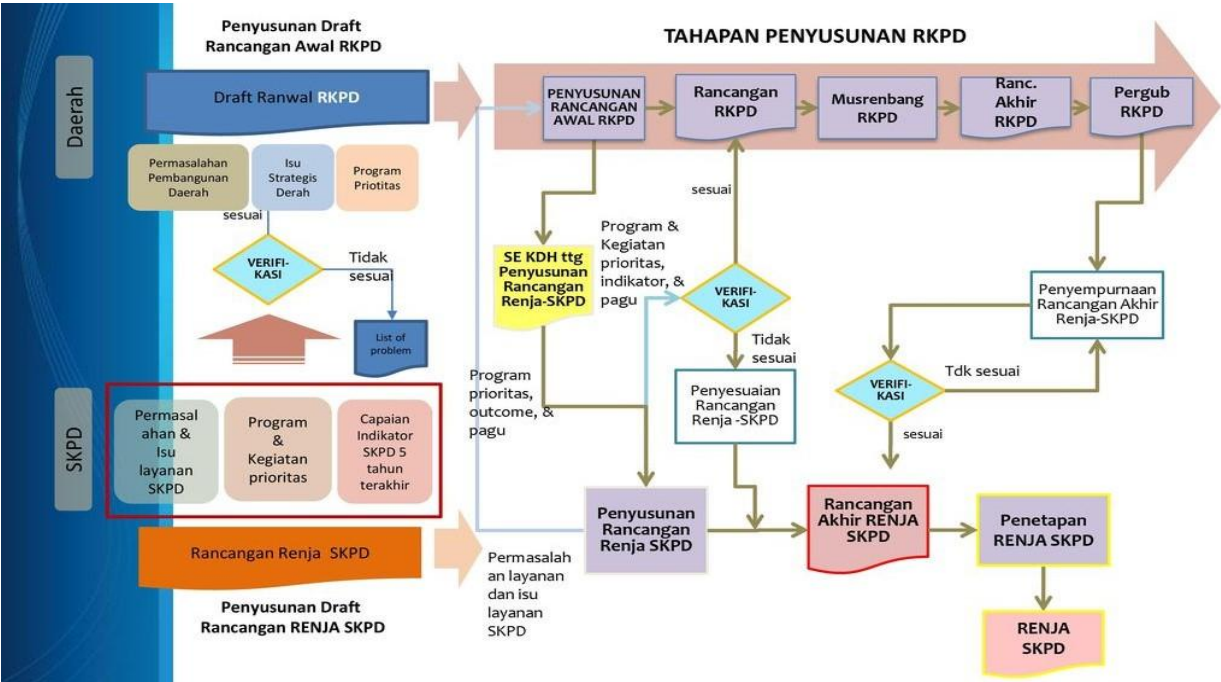
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

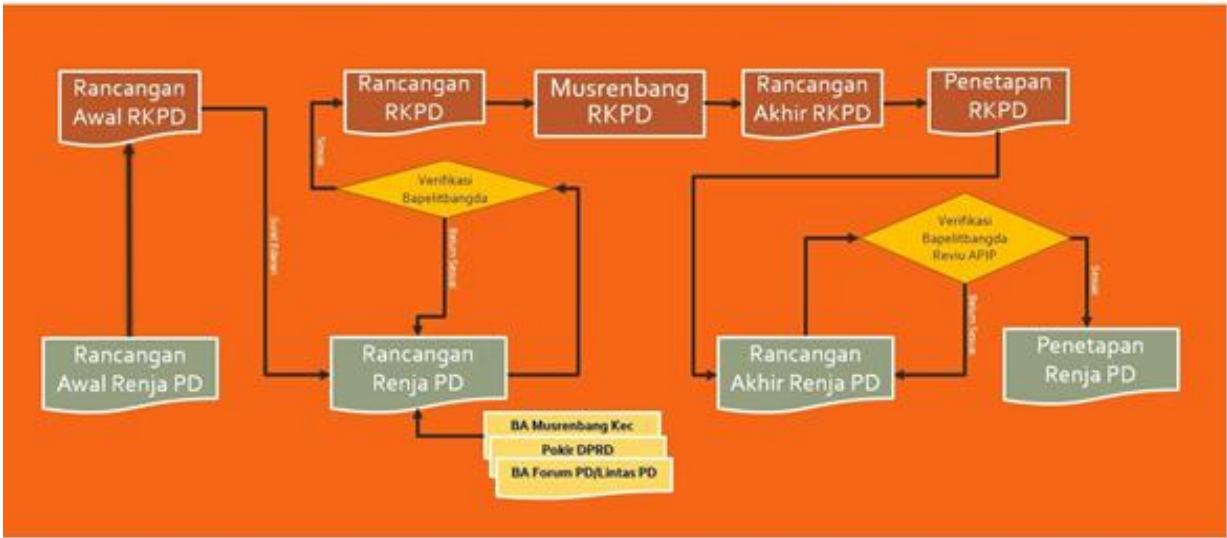
- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan RKPD



Gambar 1.2.
Tahapan Penyusunan Renja

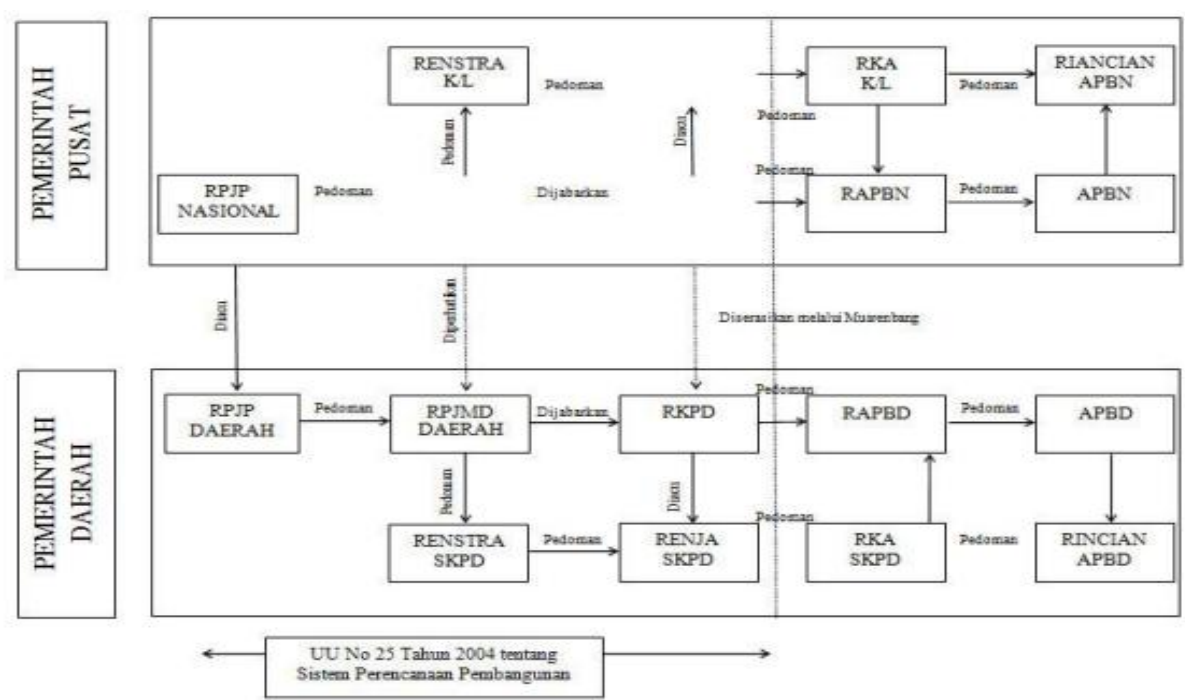


1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.3.
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Satpol PP Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041. (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 85 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1655);
21. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Satpol PP Kota Batam Tahun Anggaran 2027

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satpol PP Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masingmasing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).

3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, - 97 - Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai 4 (empat) indikator dari Tujuan dan sasaran, sedangkan Indikator Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berjumlah 6 (enam) indikator. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Kota Batam Tahun 2025, secara umum kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari empat indikator utama yang diukur, tiga indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan satu indikator belum mencapai target namun tetap berada pada kategori kinerja yang baik.

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memperoleh realisasi sebesar 53,98 dari target 51,78, dengan capaian kinerja 104,25%. Selanjutnya, Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) mencapai 85,93 dari target 80,67, atau sebesar 106,52%, yang merupakan capaian tertinggi di antara seluruh indikator. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Satpol PP juga melampaui target dengan realisasi 91,18 dari target 87, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 104,80%.

Sementara itu, Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) terealisasi sebesar 22,02 dari target 22,89, dengan capaian 96,20%. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, indikator ini masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dan memerlukan upaya peningkatan, terutama dalam aspek penguatan kapasitas kelembagaan, pembinaan anggota Satlinmas, serta peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Seluruh indikator memperoleh Status Kinerja RKPD Tahun 2025 dengan kategori ST, yang menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Batam berada pada tingkat yang baik sesuai dengan kriteria evaluasi RKPD. Capaian tersebut menjadi modal yang kuat dalam mendukung pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2029, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja, khususnya pada indikator IPM yang masih memiliki kesenjangan menuju target akhir RPJMD sebesar 61,93.

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027, dengan fokus pada upaya mempertahankan indikator yang telah melampaui target serta mempercepat peningkatan indikator yang masih memerlukan penguatan. Melalui optimalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat, penguatan pelayanan kepada masyarakat, serta sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, diharapkan seluruh target kinerja dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara optimal.

Terkait Baseline tahun 2024 nilainya 0, dikarenakan untuk IKU Satpol PP Kota Batam tidak sama dengan RENSTRA Tahun 2025-2029, Disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Indeks	0	51,78	53,98	104,25	ST	75,42
2	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	0	80,67	85,93	106,52	ST	88,91
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	0	22,89	22,02	96,20	ST	61,93
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)	Indeks	0	87	91,18	104,80	ST	95

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2027 sebagai upaya menjaga kesinambungan pencapaian sasaran strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta prinsip akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Batam berhasil mencapai realisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Indikator Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan juga memperoleh realisasi 100% dari target 100%, dengan capaian kinerja 100% dan kategori Sangat Tinggi (ST). Hal ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan fungsi penegakan peraturan daerah sebagai salah satu tugas pokok Satpol PP Kota Batam.

Pada indikator Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satpol PP Kota Batam, realisasi mencapai 11 orang dari target 12 orang atau sebesar 91.67% dengan kategori Sangat Tinggi (ST). Meskipun belum memenuhi target secara penuh, capaian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan PPNS masih perlu ditingkatkan melalui pengusulan formasi, pengangkatan, maupun peningkatan kompetensi aparatur agar pelaksanaan penegakan Perda semakin optimal.

Selanjutnya, indikator Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan Tibumtranmas mencapai realisasi 100% dari target 100%, dengan capaian kinerja 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibutuhkan telah tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas sehingga mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Indikator Persentase jumlah sarana dan prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat juga mencapai realisasi 100% dari target 100%, sehingga mendukung kelancaran operasional dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, indikator Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pendidikan dasar memperoleh realisasi sebesar 19.02% dari target 19,57%, dengan tingkat capaian 7.17% dan kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan agar seluruh personel memperoleh pendidikan dasar sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori Sangat Tinggi. Oleh karena itu, pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2027 akan diarahkan pada upaya mempertahankan indikator-indikator yang telah mencapai target, sekaligus meningkatkan indikator yang belum optimal, khususnya peningkatan jumlah PPNS dan peningkatan persentase personel yang mengikuti pendidikan dasar. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat yang semakin efektif, profesional, dan akuntabel.

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persentase	0	100	100	100	ST	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	0	100	100	100	ST	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Persentase	0	12	11	91.67	ST	20
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan	Persentase	0	100	100	100	ST	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas							
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persentase	0	100	100	100	ST	100
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (2024: hanya PNS, tahun selanjutnya seluruh ASN)	Persentase	0	19,57	19,02	97,19	ST	39,97

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

SPM bidang Trantibum Linmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat) adalah kriteria dan ukuran yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. SPM ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap masyarakat mendapatkan layanan yang konsisten dan berkualitas dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan ketertiban dan perlindungan.

Berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam Tahun 2023–2025, tingkat pemenuhan pelayanan dasar menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten pada kisaran di atas 95 persen. Pada Tahun 2023, realisasi capaian SPM mencapai 98,09%, kemudian mengalami penurunan menjadi 95,44% pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 95,49% pada Tahun 2025.

Meskipun terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2023, capaian pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan Tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tetap terlaksana dengan baik. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Satpol PP Kota Batam dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat secara berkesinambungan.

Hasil evaluasi selama periode 2023–2025 menjadi dasar dalam penyusunan Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027, dengan arah kebijakan untuk mempertahankan capaian SPM di atas 95 persen sekaligus meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan agar mampu mencapai target yang lebih optimal. Upaya yang akan dilakukan meliputi peningkatan efektivitas patroli dan penegakan Peraturan Daerah, penguatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Satlinmas, optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat terus meningkat serta memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat Kota Batam.

Tabel 2.3.
Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persen	98,09	95,44	95,49

Berdasarkan hasil pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023, Pemerintah Kota Batam melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah mencapai kategori capaian sebesar 98,09%, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar telah terlaksana dengan sangat baik dan mendekati target maksimal.

Pada indikator Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota, seluruh 119 orang penerima layanan dasar yang menjadi sasaran telah memperoleh pelayanan sehingga tingkat pemenuhan layanan mencapai 100%, tanpa terdapat penerima layanan yang belum terlayani. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan dasar kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.

Sementara itu, dari aspek pemenuhan mutu pelayanan (barang, jasa, dan sumber daya manusia), capaian secara keseluruhan mencapai 77,46%. Beberapa indikator mutu telah memenuhi target secara penuh, antara lain:

- Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP sebanyak 20 dokumen telah terpenuhi seluruhnya (100%);
- Pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat yang terdampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan Perda dan Perkada mencapai 100%;
- Pelayanan kerugian material kepada masyarakat yang terdampak penegakan Perda dan Perkada mencapai 100%;
- Pelayanan pengobatan bagi masyarakat yang mengalami cedera ringan akibat penegakan Perda dan Perkada juga telah mencapai 100%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP baru mencapai 86,21%, dimana dari kebutuhan sebanyak 29 unit, baru 25 unit yang terpenuhi dan masih terdapat 4 unit yang belum tersedia. Selain itu,

indikator peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat menunjukkan capaian 56,61%, yaitu dari kebutuhan 189 orang, baru 107 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga masih terdapat 82 orang yang belum memperoleh peningkatan kapasitas.

Secara keseluruhan, capaian SPM Tahun 2023 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah berjalan dengan baik, khususnya dalam pemenuhan layanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan melalui pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi aparatur masih menjadi prioritas yang perlu terus diupayakan agar seluruh indikator mutu pelayanan dapat terpenuhi secara optimal dan mendukung tercapainya target SPM secara berkelanjutan.

Tabel 2.4.
Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kategori Pencapaian SPM Trantibum					98,09%	
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					98,09%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	119	119	0	100,00%	
	Persentase Capaian Layanan (100%)				(20%)	18,09%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang belum terlayani/ terpenuhi		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus dilayani/dipenuhi					77,46%	
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	29	25	4	86.21%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	20	20	0	100%	
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	189	107	82	56.61%	
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	4	4	0	100%	
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	2	2	0	100%	
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	2	2	0	100%	

Pada indikator Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota, seluruh 87 orang penerima layanan dasar yang menjadi sasaran telah memperoleh pelayanan sehingga tingkat pemenuhan layanan mencapai 100%, tanpa terdapat penerima layanan yang belum terlayani. Hal ini

menunjukkan bahwa aspek pelayanan dasar kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.

Sementara itu, dari aspek pemenuhan mutu pelayanan (barang, jasa, dan sumber daya manusia), capaian secara keseluruhan mencapai 77,20%. Beberapa indikator mutu telah memenuhi target secara penuh, antara lain:

- Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP sebanyak 13 dokumen telah terpenuhi seluruhnya (100%);
- Pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat yang terdampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan Perda dan Perkada mencapai 100%;
- Pelayanan kerugian material kepada masyarakat yang terdampak penegakan Perda dan Perkada mencapai 100%;
- Pelayanan pengobatan bagi masyarakat yang mengalami cedera ringan akibat penegakan Perda dan Perkada juga telah mencapai 100%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP baru mencapai 86,21%, dimana dari kebutuhan sebanyak 9 unit, baru 9 unit yang terpenuhi. Selain itu, indikator peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat menunjukkan capaian 63,19%, yaitu dari kebutuhan 182 orang, baru 115 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga masih terdapat 67 orang yang belum memperoleh peningkatan kapasitas.

Secara keseluruhan, capaian SPM Tahun 2024 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah berjalan dengan baik, khususnya dalam pemenuhan layanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan melalui pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi aparatur masih menjadi prioritas yang perlu terus diupayakan agar seluruh indikator mutu pelayanan dapat terpenuhi secara optimal dan mendukung tercapainya target SPM secara berkelanjutan.

Tabel 2.5.
Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kategori Pencapaian SPM Trantibum					95,44%	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					95,44%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	87	87	0	100,00%	
	Persentase Capaian Layanan (100%)				(20%)	15,44%	
			Jumlah Mutu	Jumlah Mutu Yang	Mutu yang belum		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Yang Harus Dilayani Dipenuhi	Terlayani/ Terpenuhi	terlayani/ terpenuhi		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus dilayani/dipenuhi					77,20%	
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	9	9	0	100%	
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	13	13	0	100%	
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	182	115	67	63,19%	
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	0	0	0	0%	
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat	Orang	0	0	0	100%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)						
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100%	

Berdasarkan hasil pelaporan pada tabel 2.6, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tingkat capaian sebesar 95,49%, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar telah dilaksanakan dengan sangat baik dan mendekati target maksimal.

Pada aspek persentase pencapaian penerima layanan dasar, seluruh masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan telah memperoleh layanan, yaitu 81 orang yang harus dilayani dan seluruhnya telah terlayani (100%), sehingga tidak terdapat masyarakat yang belum memperoleh pelayanan.

Sementara itu, pada aspek pemenuhan mutu pelayanan, capaian masih sebesar 77,46%. Dari beberapa indikator mutu yang dinilai, sebagian besar telah terpenuhi secara optimal, antara lain:

- Pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP sebesar 100% (9 dari 9 unit tersedia).
- Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebesar 100% (10 dari 10 dokumen tersedia).
- Pemenuhan standar pelayanan terhadap dampak gangguan ketenteraman akibat penegakan hukum Perda/Perkada juga telah mencapai 100%.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang memerlukan peningkatan, yaitu pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas, dimana dari kebutuhan sebanyak 173 orang, baru 112 orang yang telah memenuhi standar kompetensi, sedangkan 61 orang lainnya belum terpenuhi. Kondisi tersebut menghasilkan capaian sebesar 64,74% pada indikator tersebut dan menjadi faktor utama yang mempengaruhi belum tercapainya nilai mutu pelayanan secara maksimal.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah mampu memberikan pelayanan dasar kepada seluruh penerima layanan sesuai target. Ke depan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP serta Satlinmas perlu menjadi prioritas agar seluruh indikator mutu pelayanan dapat terpenuhi secara optimal dan capaian SPM dapat mencapai 100%.

Tabel 2.6.
Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kota Batam
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kategori Pencapaian SPM Trantibum					95,49%	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					95,49%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	81	81	0	100,00%	
	Persentase Capaian Layanan (100%)				(20%)	15,49%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang belum terlayani/ terpenuhi		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus dilayani/dipenuhi					77,46%	
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	9	9	0	100%	
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	10	10	0	100%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	173	112	61	64,74%	
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1	1	0	0%	
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100%	
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100%	

2.3. Rumusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025 sebagaimana Tabel 2.7 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada tahun 2025 adalah :
 - a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi 49.44%
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi 73.88%
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Kegiatan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional 43.49%;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah 0%;
 - Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 78.47%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100% mencapai 100%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Target 100% mencapai 100%
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target 100% mencapai 100%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 100% mencapai 100%
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target 100% mencapai 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 100% mencapai 100%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tetap berjalan secara optimal dan capaian kinerja tetap terpenuhi walaupun anggarannya tidak terealisasi;
 - 2) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terealisasi karna pengadaan barang (APPAR, pemadam kebakaran) tidak tercatat dalam buku RKBMD.
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Kegiatan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional Pol

PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional yang tahun ini adanya perubahan mekanisme Pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan secara daring;

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah secara keuangan tidak tercapai, tetapi secara fisik tercapai, karna sub kegiatan ini adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan Penertiban, dalam pelaksanaan kondisi yang sangat kondusif.
- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa tidak terealisasi karna kondisi situasional yang kondusif dan tidak terdapat aktivitas unjuk rasa;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah belum memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam secara keseluruhan.

Dengan tidak tercapainya target Program Trantibum, diperlukan penyesuaian strategi dan penguatan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.7.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	79.85	0	70.55	70.55	100	74.70	74.70	93,55%
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	95	0	87	91.18	100	89	91,18	95,98%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100	0	0	0	0	100	100	100%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	0	0	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	22,22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	0	0	0	0	3 Laporan	3 Laporan	25%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100	0	100	90.22	90.22	100	100	100
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	598 Orang	0	598 Orang	589 Orang	98.49%	598 Orang	589 Orang	98.49%
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	40%
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	0	86.05	96.52	112.17	3.82	89,87	89,97%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	0	3 Paket	3 Paket	100%	0	3 Paket	100%
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	129	0	111 Orang	111 Orang	100%	5 Orang	116 Orang	89,92%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100	0	100%	79.56	79.56	100	100	100%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	0	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33	0	5 Paket	5 Paket	100	7 Paket	12 Paket	36.36
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	25%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	0	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	6 Paket	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	0	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	4 Paket	40%
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	0	100%	84.39	84.39	100	100	100%
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	1 Unit	1 Unit	100	0	1 Unit	100%
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	208	0	72 Unit	72 Unit	100	46 Unit	118 Unit	56,73%
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	294	0	21 Unit	21 Unit	100	70 Unit	91 Unit	30.95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100	0	100%	97.87	97.87	100	100	100%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	40%
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	40%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100	0	100%	93.70	93.70	100%	100%	100%
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1	0	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya								
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	0	11 Unit	11 Unit	100	11 Unit	11 Unit	100%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	0	28 Unit	28 Unit	100	51 Unit	51 Unit	159,38%
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	0	4 Unit	2 Unit	50	4 Unit	4 Unit	100%
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp	100	0	100%	100	100%	100	100	100%
		persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar	39.97	0	19.57	18.73	95.70	23.41	23.41	58.57%
		Persentase perda perkara yang di tegakan	100	0	100%	100	100	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase penyelenggaraan satlinmas	100	0	9.09	5.45	59.96	31.82	37.27	37.27%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum	100	0	100%	100	100	100	100	100%
		Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas	100	0	9.09	5.45	59.96	31.82	37.27	37.27%
		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol P	39.97	0	19.57	18.73	95.71	23.41	23.41	58.57%
		Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100	0	100%	100	100	100	100	100%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum	100	0	100%	100	100	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada								
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5 Dokumen	6 Dokumen	25%
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	8 Dokumen	9	75%
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	0	12 Dokumen	1 Dokumen	8.33	3 Dokumen	4	33.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12	0	12 Dokumen	1 Dokumen	8.33	0	1	8.33
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	130	0	2 Orang	9 Orang	450%	35 Orang	44 Orang	33,84%
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	562	0	50 Orang	24 Orang	48%	100 Orang	124	22,06%
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	60	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24	40%
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	20	0	4 Laporan	12 Laporan	100	6 Laporan	18 Laporan	90%
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.026	0	9	9 Unit	100	615 Unit	624 Unit	20,62%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	4	0	0	0	0	1 Dokumen	1	25
1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	3	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada	100	0	100%	95.42	95.42	100	100	100
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan	4	0	0	0	0	1 Dokumen	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	28	0	0	0	0	11	11	39.29%
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24	0	0	0	0	6 Laporan	6	25%
1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	24	0	0	0	0	6 Laporan	6	25%
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24	40%
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas	60	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP								
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12	24	40%
1.05.02.2.02.0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	3	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	10.44	0	6.04	6.04	100	7.14	7.14	68.39%
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	12	0	0	0	0	3	3	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	8	0	0	0	0	2 Laporan	2 Laporan	25%
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	48	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	25%
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	20	0	3 Laporan	1 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	15%

2.3.2. Permasalahan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Perlunya Profesionalitas dan Disiplin Anggota;
2. Perlunya Peningkatan SDM Polisi Pamong Praja;
3. Lemahnya Peran Linmas;
4. Keterbatasan Operasional Sarana dan Prasarana;
5. Belum Optimalnya Pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Belum optimalnya pendataan Trantibum dan Perda perkada, tercermin dari masih terbatasnya informasi lapangan yang terdokumentasi dengan baik untuk mendukung perencanaan dan pengawasan;
7. laporan kinerja PPNS belum tersedia sehingga proses evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tugas belum dapat dilakukan secara menyeluruh;

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya upaya koordinasi dengan Instansi terkait;
2. Perlunya peningkatan upaya Pengawasan Pelanggaran Trantibum dan Perda Perkada;
3. Masih tingginya Pelanggaran Trantibum dan Perda Perkada;
4. Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan-peraturan daerah masih kurang;
5. Kurangnya kesadaran Dan Kepatuhan masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Konflik Sosial dan Keamanan Lingkungan, serta aksi unjuk rasa yang tidak terkoodinasi;
7. Mobilitas Masyarakat yang tinggi sehingga menimbulkan pedagang kaki lima (PKL) yang baru dan Pelanggaran tata ruang;

Analisis terhadap lingkungan internal Satpol PP Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1381);
4. Dukungan Anggaran Dasar Operasional Kegiatan;
5. Hubungan Kerjasama/Koordinasi yang baik antar instansi;

6. SOP dan Dokumen Perencanaan Dasar Sudah Tersedia;

b. Kelemahan (weaknesses)

1. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait;
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Operasional;
4. Kurangnya Inovasi Teknologi Informasi sehingga pengaduan masyarakat belum maksimal;

2.3.3. Kondisi Lingkungan Dinamis

Untuk pengembangan pelayanan Satpol PP Kota Batam terdapat beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Satpol PP Kota Batam yaitu:

- a. Adanya dukungan anggaran dan sarpras dari Pemerintah Kota Batam;
- b. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM;
- c. Adanya Diklat-diklat yang diberikan kepada personil ASN Satpol PP dalam pengembangan kompetensi;
- d. Keberadaan Jafung Pol PP;
- e. Adanya potensi aparatur Satpol PP hasil mengikuti Diklat;

Di samping ada beberapa peluang yang dihadapi terdapat pula Hambatan Satpol PP Kota Batam Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Satpol PP Kota Batam masih menghadapi beberapa hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah Kota Batam, jumlah penduduk, serta tingginya aktivitas ekonomi dan pembangunan, sehingga pengawasan, patroli, dan penegakan Perda belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
2. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam bidang penegakan Perda, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penanganan konflik sosial, pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terbatasnya jumlah PPNS yang bertugas di lingkungan Satpol PP sehingga proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Sarana dan prasarana operasional yang masih perlu ditingkatkan, seperti kendaraan patroli, peralatan komunikasi, perangkat teknologi informasi, perlengkapan pengamanan, serta fasilitas pendukung operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.
5. Masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku masih sering ditemukan dan memerlukan upaya pembinaan maupun penegakan hukum secara berkelanjutan.
6. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), baik dari aspek kelembagaan, jumlah anggota aktif, kompetensi, maupun dukungan anggaran dan sarana pendukung, sehingga peran Satlinmas dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban masyarakat belum maksimal.

7. Meningkatnya kompleksitas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum seiring pertumbuhan Kota Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, pelabuhan, dan pariwisata, yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pengawasan dan penanganan berbagai bentuk pelanggaran.
8. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi data antar perangkat daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
9. Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional, pengembangan kapasitas aparatur, pengadaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan dan pelayanan masyarakat masih perlu ditingkatkan, termasuk pengembangan sistem pelaporan pengaduan, pemetaan wilayah rawan gangguan trantibum, dan pemantauan berbasis digital.

Implikasi terhadap Renja Tahun 2027 Hambatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027, yang diarahkan pada:

- peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Satpol PP dan PPNS;
- penguatan kelembagaan dan pemberdayaan Satlinmas;
- pemenuhan sarana dan prasarana operasional;
- optimalisasi patroli dan penegakan Perda berbasis wilayah rawan;
- peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pelayanan pengaduan masyarakat;
- penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait; dan
- peningkatan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat untuk mendorong kepatuhan terhadap Perda dan Perkada.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP dalam mewujudkan Kota Batam yang aman, tertib, tenteram, dan kondusif sesuai dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029.

2.4. Telaahan Pokok-pokok pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang bersumber dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokir tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah sepanjang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi usulan pada tahapan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2027, tidak terdapat usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi kewenangan atau dialokasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2027. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2027 sepenuhnya mengacu pada arah

kebijakan pembangunan daerah, target kinerja RPJMD, hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, kebutuhan pelayanan, serta isu-isu strategis yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Dengan demikian, tidak terdapat program maupun kegiatan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Tabel 2.8.
Pokok-pokok pikiran DPRD

NO	PENGUSUL	USULAN	URAIAN PEKERJAAN	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					

2.5. Inovasi bidang urusan dalam Upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang lebih efektif, Satuan Polisi Pamong Praja terus mengembangkan berbagai inovasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, penguatan kemitraan dengan masyarakat, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Inovasi-inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, humanis, dan akuntabel.

Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain sebagai berikut:

1. PRABINMAS

Prabinmas adalah (Praja Pembina Perlindungan Masyarakat) yang di tempatkan / di Bko diseluruh Kelurahan Kota Batam, merupakan inovasi yang mengedepankan pendekatan preventif melalui kegiatan patroli dialogis dan pembinaan kepada masyarakat. Melalui PRABINMAS, personel Satpol PP Kota Batam tidak hanya melakukan pengawasan terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi juga memberikan edukasi, sosialisasi peraturan daerah, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum.

2. SIAP GARDA

Siap Garda adalah (Sistem Informasi dan Pelayanan Gangguan Ketenteraman Daerah) merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan meningkatkan kecepatan penanganan laporan Masyarakat Kota Batam terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Melalui sistem ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara lebih mudah,

sementara Satpol PP Kota Batam dapat melakukan koordinasi, tindak lanjut, pemantauan, dan evaluasi penanganan laporan secara lebih efektif, cepat, dan terukur.

3. PENGETIK BATAM

Pengetik Batam adalah (Sistem pengawasan penegakan kode etik polisi pamong praja kota batam) merupakan inovasi internal yang bertujuan memperkuat budaya kerja aparatur melalui penerapan nilai-nilai integritas, disiplin, profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Penerapan kode etik ini diharapkan mampu membentuk karakter personel Satpol PP Kota Batam yang berintegritas, humanis, responsif, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

4. SANJUNGLAH BATAM

Sanjunglah Batam adalah (Satpol PP Berkunjung ke Sekolah di Batam) merupakan inovasi edukatif yang dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah Kota Batam untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap peraturan, wawasan kebangsaan, serta kesadaran hukum sejak usia dini. Program ini juga bertujuan memperkenalkan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Batam kepada generasi muda serta membangun sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif.

5. INTELDENI

Inteldeni (Intelijen Deteksi Dini), Inovasi ini merupakan pendekatan berbasis pengumpulan informasi, pemetaan potensi gangguan, analisis risiko, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta ancaman terhadap perlindungan masyarakat.

Kegiatan pemantauan lapangan, koordinasi lintas perangkat daerah, sinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi. Informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menentukan tingkat kerawanan dan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan secara terukur.

Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih luas. Selain itu, inovasi ini mendukung efisiensi pelaksanaan patroli, pengawasan, dan operasi penegakan Peraturan Daerah dengan memprioritaskan lokasi, waktu, dan objek yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan hasil analisis intelijen.

Melalui implementasi berbagai inovasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, ketenteraman dan ketertiban umum yang

kondusif, serta perlindungan masyarakat yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tabel 2.9.
Inovasi Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum

Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Otcome	Indikator yang di dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Pelayanan Publik Berkualitas serta Kondusivitas Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Prabinmas (Praja Pembina Perlindungan Masyarakat)	Inovasi Pelayanan Publik	Masih terdapat gangguan trantibum dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.	Meningkatkan deteksi dini, respon cepat, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.	Menurunnya gangguan ketenteraman dan meningkatnya rasa aman masyarakat.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas.
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Pelayanan Publik Berkualitas serta Kondusivitas Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Siap Garda (Sistem Informasi dan Pelayanan Gangguan Ketenteraman Daerah)	Inovasi Digital	Pengaduan masyarakat belum terintegrasi dan waktu respons penanganan masih perlu ditingkatkan	Mempercepat penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara digital.	Pelayanan pengaduan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD.
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berorientasi Pelayanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengetik Batam (Sistem pengawasan penegakan kode etik polisi pamong praja kota batam)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan /Internal	Belum optimalnya pemahaman, kepatuhan, dan pengawasan terhadap penerapan kode etik serta disiplin anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pelayanan, penegakan Perda, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.	Meningkatkan integritas, disiplin, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatatur Satpol PP melalui sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penerapan kode etik.	Terwujudnya aparatatur Satpol PP yang berintegritas, profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU).
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Sanjungleh Batam (Satpol PP Berkunjung ke Sekolah di Batam)	Inovasi Pelayanan Publik/ Sosial	Masih rendahnya pemahaman pelajar mengenai ketertiban umum, disiplin, kepatuhan terhadap peraturan, serta pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan sekolah dan masyarakat	Memberikan edukasi sejak dini kepada pelajar mengenai tugas dan fungsi Satpol PP, nilai-nilai disiplin, kepatuhan terhadap peraturan, pencegahan kenakalan remaja, anti perundungan (bullying), serta meningkatkan kesadaran hukum dan bela negara.	Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, dan karakter disiplin pelajar serta terbangunnya citra positif Satpol PP sebagai mitra edukasi masyarakat.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Persentase Penyelenggaraan Trantibum, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Pelayanan Publik Berkualitas serta Kondusivitas Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Inteldeni (Intelijen Deteksi Dini)	Inovasi Tata Kelola	Belum optimalnya deteksi dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan konflik sosial.	Memperkuat analisis informasi, pemetaan potensi kerawanan, dan langkah pencegahan.	Gangguan ketenteraman dapat dicegah lebih awal sehingga kondisi daerah tetap kondusif.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, IPKKU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Batam Tahun 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Batam Tahun 2027. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut menjadi dasar dalam menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai selama tahun perencanaan.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah “**meningkatkan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum**”. Mempunyai target 70.81%. Tujuan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Batam melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, tenteram, dan kondusif sebagai prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, meningkatnya pelayanan publik, berkembangnya investasi, serta terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP secara profesional, proporsional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diarahkan tidak hanya pada tindakan represif, tetapi juga mengedepankan upaya preventif, persuasif, edukatif, dan pembinaan guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu

1. Terwujudnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Perda dan Perkada ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan ;

Sasaran ini mencerminkan kondisi yang diharapkan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, aman, dan kondusif.

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparatur, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kecepatan respons terhadap pengaduan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, terwujudnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan melalui peningkatan intensitas patroli, pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, pengamanan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam implementasinya, pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Hasil pengukuran kinerja tersebut menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kota Batam sekaligus sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan tujuan dan sasaran tersebut, Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan Kota Batam yang aman, tertib, tenteram, kondusif, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan pembangunan daerah yang berdaya saing.

Tabel 3.1.
Target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2027

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2027
1	2	3	4	5
	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	70.81%
		1. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	86,12
			2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	55.89%
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	91

Dari hasil Evaluasi sudah disampaikan Analisa keberhasilan pencapaian kinerja Renja. Salah satu Indikator Sasaran telah melebihi Target yaitu Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), target pada Renja Tahun 2027 ditetapkan sebesar 86,12.

Penetapan target tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan capaian kinerja aktual. Hal ini karena target IPKKU Tahun 2027 yang sebelumnya sebesar 85,73 telah terlampaui dengan realisasi kinerja Tahun 2025 yang mencapai 85,93.

Dengan demikian, agar target kinerja tetap mencerminkan prinsip *continuous improvement* (peningkatan berkelanjutan) serta memberikan tantangan yang realistis bagi organisasi, target yang digunakan pada Renja Tahun 2027 mengacu pada target tahun berikutnya dalam dokumen perencanaan, yaitu sebesar 86,12.

3.2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Kota Batam, serta Renstra Satpol PP Kota Batam, sehingga terwujud keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Dalam mendukung prioritas Kota Batam terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif, Satpol PP Kota Batam mengarahkan kebijakan pada peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang kondusif. Kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pelayanan publik dan program perlindungan sosial secara efektif.

Untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan dunia industri, Satpol PP Kota Batam memfokuskan kebijakan pada peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta penguatan profesionalisme dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Aparatur yang kompeten akan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan humanis.

Dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Satpol PP memperkuat pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta mendukung iklim investasi dan aktivitas ekonomi daerah.

Selanjutnya, dalam mendukung pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, Satpol PP berperan menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan ruang publik sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal tanpa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pada aspek penguatan infrastruktur dan tata kelola perkotaan, arah kebijakan Satpol PP Kota Batam difokuskan pada peningkatan pengawasan, Deteksi Dini, Penertiban, Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah terhadap pemanfaatan ruang, bangunan, fasilitas umum, fasilitas sosial, reklame, pedagang kaki lima, serta aset milik pemerintah daerah. Kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan Kota Batam yang tertib, aman, nyaman, bersih, dan berdaya saing sebagai kota industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah secara profesional, humanis, akuntabel, dan kolaboratif sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Batam Tahun 2027.

Tabel 3.2.
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau,
Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Batam	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
1	2	3	4
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PP 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	P2. Peningkatan softskill maupun hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia industri	• Memperkuat hukum dan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda/Perkada secara tegas namun terukur. • Penguatan deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. • Peningkatan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. • Pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. • Pelatihan teknis, etik, dan hukum bagi personel Satpol PP secara berkala. • Memperkuat sistem dan mekanisme deteksi dini terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum • Mengoptimalkan kegiatan patroli, pengawasan, dan pemantauan wilayah secara berkelanjutan • Mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan Masyarakat • Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan deteksi dan cegah dini • Evaluasi berkala terhadap efektivitas SOP dan penerapannya di lapangan • Penguatan kolaborasi dengan instansi terkait • Pembentukan forum warga atau satgas lingkungan untuk deteksi dini gangguan trantibum • Penilaian dan publikasi laporan kinerja penegakan perda secara berkala

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Batam	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
1	2	3	4
			• Pelibatan tokoh masyarakat sebelum penertiban • Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi SDM Kesekretariatan di Satpol PP Kota Batam • Mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi untuk mempermudah akses dan percepatan pelayanan kepada Masyarakat • Menyusun, menyosialisasikan, dan menerapkan SOP pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan dipatuhi • Meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan kepada publik melalui media yang mudah diakses dan transparan • Memperkuat mekanisme pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada Perencanaan Tahun 2027 merupakan tahun ke-3 (tiga) dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan Visi dan Misi Satpol PP Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 2 (dua) Program 11 (sebelas) kegiatan dengan 39 (tiga puluh Sembilan) jenis Sub Kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam table berikut:

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Proritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				80.646.866.059									96.264.308.004	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				80.646.866.059									96.264.308.004	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				80.646.866.059									96.264.308.004	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD	79.85	75.95 Nilai	76.038.524.709								77,15	91.277.742.804	
		Indeks pelayanan kesekretariatan PD	95	91 Nilai									93		
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 Persentase	6.545.500								100	10.640.200	
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	4.168.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan		Pemerintah Kota Batam	2	3.453.40	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	sosial adaptif integratif					
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	2.377.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan, Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	3	7.186.800	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 Persentase	72.117.321.445								100	88.848.222.880	
1.05.01.2.02. 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		589 Orang/ bulan	72.059.263.238	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	598	88.770.782.880	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.02. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	58.058.207	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	12	77.440.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	dengan memperhatikan kelestarian lingkungan						
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)		92,25 Persentase	50.150.000								96,12	50.120.000,00	
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	50.150.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	5	50.120.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Ekonomi Hijau, dan Ekono							
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran			399.090.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						100	526.195.800	
1.05.01.2.06. 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.580.700	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	1	9.712.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	137.843.900	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim,	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan		Pemerintah Kota Batam	7	185.183.800	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	perlindungan sosial adaptif integratif					
1.05.01.2.06. 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	109.293.700	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	3	122.546.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	46.085.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	2	36.980.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	90.286.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	12	155.208.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono							
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persentase	696.145.600								100	395.545.804	
1.05.01.2.07. 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		66 Unit	218.902.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	35	129.791.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.07. 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		64 Unit	477.243.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim,	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan		Pemerintah Kota Batam	67	265.754.804	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	perlindungan sosial adaptif integratif					
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 Persentase	413.338.664								100	385.165.120	
1.05.01.2.08. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	242.636.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	12	210.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Proritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono							
1.05.01.2.08. 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	170.702.064	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	12	174.565.120	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persentase	2.355.933.000								100	1.050.576.000	
1.05.01.2.09. 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	45.140.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	1	41.380.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Hijau, dan Ekono							
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	176.410.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	11	189.266.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		28 Unit	21.920.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	30	22.530.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2.112.463.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota Batam	4	797.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Proritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	memperhat ikan kelestarian lingkungan						
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp	100	100 Persentase	4.608.341.350								100	4.986.565.200	
		persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasa	39,97	28.93 %									34.45		
		Persentase perda perkada yang di tegakan	100	100 Persentase									100%		
		Persentase penyelenggaraan satlimas	100	54,55 Persentase									77.27		
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantib		100 Persentase	4.281.680.950								100	4.084.112.400	
		Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas		54,55 Persentase									77.27		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP		28,93 Persentase									34.45		
		Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan		100 Persentase									100		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada		100 Persentase									100		
1.05.02.2.01. 0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		5 Dokumen	2.286.300	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	6	3.420.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01. 0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka		8 Dokumen	66.137.350	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim,	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	61.204.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	sosial adaptif integratif					
1.05.02.2.01.0012	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.		2 Orang	24.090.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0013	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		128 Orang	54.864.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	128	58.240.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Ekonomi Hijau, dan Ekono							
1.05.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		2 Orang	21.650.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		12 laporan	79.641.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	12	93.240.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk		12 Laporan	1.564.621.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	12	1.107.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rasa dan Kerusakan Massa	Rasa dan Kerusakan Massa yang Dilakukan Penindakan						Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	sosial adaptif integratif					
1.05.02.2.01. 0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		6 Laporan	33.190.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	4	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01. 0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		1240 Unit	2.024.142.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1.201	2.297.946.200	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Proritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Hijau, dan Ekono							
1.05.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas		1 Dokumen	61.286.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	86.214.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0022	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal		1 Dokumen	3.450.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	5.924.400	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0024	Sub Kegiatan Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen	2.070.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	5.237.800	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan						
1.05.02.2.01. 0025	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas		30 Orang	344.250.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada		100 Persentase	229.401.400							-	100	728.813.800	
1.05.02.2.02. 0007	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2 laporan	2.823.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan,	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	5	31.680.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	kelestarian lingkungan						
1.05.02.2.02. 0008	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		6 laporan	37.810.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	6	232.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02. 0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 Laporan	53.171.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	12	42.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		2 Laporan	7.763.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	12	134.880.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	124.381.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	12	244.850.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.0013	Sub Kegiatan Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada		1 Dokumen	3.450.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasemba	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	5.237.800	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	ikan kelestarian lingkungan						
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota			8,24 Persentase	97.259.000								9.34	173.639.000	173.639.000
1.05.02.2.03. 0004	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		2 Laporan	68.275.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	2	62.874.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.03. 0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		2 Laporan	28.983.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantap kan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa melalui Swasemba da Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi	-Prioritas Provinsi 1. Pengemban gan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhat ikan kelestarian lingkungan	Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	5	76.545.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Provinsi	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Hijau, dan Ekono							
	TOTAL :						80.646.866.059		92.264.308.004						

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk pencapaian Program Prioritas Daerah, Kontribusi terhadap pencapaian Target Nasional, Pencapaian SPM, dan Tematik lainnya sesuai bidang urusan

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, Satpol PP Kota Batam pada Tahun 2027 mengalokasikan 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program ini merupakan program utama yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus menjadi instrumen untuk mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Batam Tahun 2027.

Pelaksanaan program tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan yang mencakup Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Ketiga kegiatan tersebut disusun untuk memastikan seluruh aspek pelayanan dasar dapat terlaksana secara terpadu, mulai dari upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum daerah, hingga penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya, ketiga kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang menjadi operasional pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Batam selama Tahun 2027. [1] Sub kegiatan tersebut meliputi Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, [2] Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, [3] Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan, [4] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat, [5] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas, [6] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, [7] Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, [8] Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, [9] Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota, [10] Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, [11] Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota, [12] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, [13] Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, [14] Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti), [15] Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, [16] Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah, [17] Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, [18] Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, [19] Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada, [20] Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah, [21] Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Melalui pelaksanaan 1 program, 3 kegiatan, dan 21 sub kegiatan tersebut, Satpol PP Kota Batam diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Keseluruhan program dan kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target SPM, sasaran pembangunan daerah, serta visi dan misi Pemerintah Kota Batam sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2027 dan Renstra Satpol PP Kota Batam Tahun 2025–2029. Tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.
Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027 terhadap
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	SPM	Perangkat Daerah	Program RKPD 2027	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RKPD 2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			4.608.341.350
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.281.680.950
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2.286.300
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	66.137.350
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar	0

No	SPM	Perangkat Daerah	Program RKPD 2027	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RKPD 2027
1	2	3	4	5	6	7
					Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
					Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	24.090.000
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	54.864.400
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinma	21.650.000
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	79.641.600
					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.564.621.600
					Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan	33.190.800

No	SPM	Perangkat Daerah	Program RKPD 2027	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RKPD 2027
1	2	3	4	5	6	7
					Perturan kepala daera	
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.024.142.500
					Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	61.286.400
					Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.450.000
					Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	2.070.000
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	344.250.000
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		229.401.400
					Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.823.600
					Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	37.810.800
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	53.171.800
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	7.763.600
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap	124.381.600

No	SPM	Perangkat Daerah	Program RKPD 2027	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RKPD 2027
1	2	3	4	5	6	7
					Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	3.450.000
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		97.259.000
					Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	68.275.400
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	28.983.600

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Strategis Nasional (ProSN) pada bidang Kesehatan untuk Semua, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berkontribusi melalui dukungan terhadap upaya Percepatan Penurunan Stunting. Meskipun Satpol PP Kota Batam bukan merupakan perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan secara langsung, peran Satpol PP Kota Batam diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, serta akuntabel. Dukungan lintas perangkat daerah merupakan bagian dari pendekatan konvergensi dalam percepatan penurunan stunting yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2027, dukungan tersebut dilaksanakan melalui Proyek Kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, serta sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sehingga program dan kegiatan Satpol PP dapat mendukung prioritas pembangunan secara efektif.

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebanyak 4 dokumen, didukung pagu indikatif sebesar Rp4.168.000. Dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah berjalan sesuai prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, Satpol PP Kota Batam berkomitmen untuk mendukung pencapaian sasaran RKPD Kota Batam Tahun 2027 serta Program Strategis Nasional, khususnya dalam percepatan penurunan stunting melalui penguatan tata kelola pemerintahan, sinkronisasi perencanaan, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyusunan Renja sebagai penjabaran tahunan Renstra perangkat daerah yang mendukung sasaran pembangunan daerah dan nasional. Tersaji dalam table dibawah ini :

Tabel 4.3.
Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Kota Batam terhadap
Program Strategis Nasional (ProSN)

ProSN	Indikator	Proyek Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikator	Unit SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kesehatan untuk Semua	Stunting	Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	4.168.000	Satpol PP Kota Batam

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Prioritas Nasional Tahun 2027, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berkontribusi terhadap Prioritas Nasional 2, yaitu *Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru*. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi salah satu program utama Satpol PP dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

Program ini diarahkan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif merupakan prasyarat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program Satpol PP memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim yang mendukung keberhasilan berbagai agenda pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2027, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.608.341.350, (Empat milyar enam ratus delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan operasional Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Batam. Pengelolaan anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara profesional, responsif, dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan program tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian target Prioritas Nasional sekaligus mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada terciptanya Kota Batam yang aman, tertib, kondusif, serta memiliki daya saing sebagai kawasan perdagangan, industri, investasi, dan pariwisata. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Tersaji dalam table di bawah ini:

Tabel 4.4.
Dukungan Program RKPD Kota Batam terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027	Pagu 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	4,608,341,350	Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berkontribusi terhadap Prioritas 3, yaitu *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu*. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi program dasar dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola pemerintahan, serta kinerja perangkat daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan instrumen untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penguatan fungsi perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, administrasi umum, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Selain mendukung reformasi birokrasi, pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur melalui pengelolaan administrasi yang profesional dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dengan tata kelola organisasi yang semakin baik, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Melalui dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik. Tersaji dalam table di bawah ini :

Tabel 4.5.
Dukungan Program RKPD Kota Batam terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2027	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027
1	2
Prioritas 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Satpol PP Kota Batam)

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 yang diselaraskan dengan target akhir periode perencanaan Tahun 2030. Penetapan target tersebut didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, potensi sumber daya yang dimiliki, serta arah kebijakan pembangunan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pelayanan publik.

Terdapat empat indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Batam. Indikator pertama yaitu Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 53,98. Pada Tahun 2027 ditargetkan meningkat menjadi 70,81, dengan target akhir Tahun 2029 sebesar 75,42. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Indikator kedua adalah Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). Capaian Tahun 2025 sebesar 85,93, sedangkan target Tahun 2027 ditetapkan sebesar 86,12, dan ditingkatkan kembali hingga mencapai 88,91 pada akhir Tahun 2029. Target tersebut disesuaikan dengan metodologi pengukuran, kondisi riil penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta strategi peningkatan kualitas penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum secara berkelanjutan.

Indikator ketiga yaitu Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 22,02, target Tahun 2027 sebesar 57,86, dan target akhir Tahun 2029 sebesar 61,93. Target yang ditetapkan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap komponen penilaian indikator, penyesuaian kebijakan nasional, serta upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat secara bertahap.

Selanjutnya, indikator keempat adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Pada Tahun 2025 nilai yang tercatat sebesar 91,18, sedangkan target Tahun 2027 ditetapkan sebesar 93 poin dan meningkat menjadi 97 poin pada Tahun 2029. Target tersebut mencerminkan komitmen Satpol PP Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan yang cepat, profesional, responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin tinggi.

Secara keseluruhan, target Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 menjadi arah bagi seluruh program dan kegiatan Satpol PP Kota Batam agar lebih terfokus pada pencapaian hasil (outcome) yang terukur. Melalui

pelaksanaan program yang efektif, sinergi dengan perangkat daerah terkait, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia, diharapkan seluruh target kinerja Tahun 2027 dapat tercapai dan menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan target akhir pembangunan perangkat daerah pada Tahun 2030. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Dibawah ini.

Tabel 5.1.
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 dan Target Akhir Tahun 2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2029
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Indeks	53.98	70.81	75.42
2	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	85.93	86.12	88.91
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	22.02	57.86	61.93
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)	Indeks	91.18	93	95

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penetapan target tahun 2027 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satpol PP Kota Batam Tahun 2025–2029, sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan.

Berdasarkan Tabel 5.2, terdapat enam Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tolok ukur kinerja Satpol PP Kota Batam pada Tahun 2027. Target persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Tibumtranmas) yang dilaksanakan oleh Satpol PP ditetapkan sebesar 100 persen, sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui kegiatan patroli, pengamanan, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya, persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan juga ditargetkan mencapai 100 persen, yang mencerminkan optimalisasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah secara profesional, humanis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satpol PP ditargetkan meningkat dari 11 orang pada tahun 2025 menjadi 16 orang pada tahun 2027, sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan sumber daya aparatur yang mampu mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

Pada aspek tata kelola organisasi, persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia dalam penegakan Perda, Perkada, dan penyelenggaraan Tibumtranmas ditargetkan tetap 100 persen, sehingga seluruh pelaksanaan tugas memiliki pedoman kerja yang jelas, terstandar, dan akuntabel.

Sementara itu, persentase ketersediaan sarana dan prasarana minimal sebagai penunjang penegakan Perda, Perkada, serta penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga ditargetkan sebesar 100 persen. Target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan peralatan operasional guna mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan efektif.

Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur menjadi salah satu fokus utama. Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar ditargetkan meningkat dari 19,02 persen pada tahun 2025 menjadi 28,93 persen pada tahun 2027, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi teknis, profesionalisme, disiplin, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas penegakan Perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Secara keseluruhan, target-target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, mengoptimalkan penegakan Perda dan Perkada, serta mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang semakin efektif, profesional, dan akuntabel di Kota Batam. Target tersebut sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja Satpol PP Kota Batam dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2027.

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Kunci
Satpol PP Kota Batam

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2029
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persentase	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Persentase	11	16	20
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum,	Persentase	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2029
1	2	3	4	5	6
	ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat				
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (2024: hanya PNS, tahun selanjutnya seluruh ASN)	Persentase	19.02	28.93	39.97

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Satpol PP Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satpol PP Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Satpol PP Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1. Catatan Penting

Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Satpol PP Kota Batam Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029

Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas dua program, sebelas kegiatan dan tiga puluh Sembilan sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satpol PP Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027 , maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027

6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Kota Batam Tahun 2025–2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kota Batam, maka seluruh aparatur Satpol PP Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja 2027.

Demikian Rencana Kerja Satpol PP Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Satpol PP Kota Batam dalam pelayanan dasar.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD